

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafik, Jakarta, 1999.

B.D. Sri Marsita G,S.H., dkk, *Keberadaan Kejaksaan RI Dalam Upaya Menyelamatkan Kekayaan Negara*, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2000.

Chaerul Amir, *Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis, dan yuridis, Pro Delender*, Jakarta, 2014.

Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspekti HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Juliyanti Safitri Siregar, *Tesis, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan eksekusi atas putusan peninjauan kembali (Studi kasus : Putusan nomor 247 PK/PDT/2013)*, Universitas Andalas, Padang, 2015.

K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Keuangan Hasil Korupsi, Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahmkamh Agung Republik Indonesia, *Makna “Uang Negara” dan “Kerugian Negara” Dalam Putusan Pidana Korupsi Kaitannya Dengan BUMN atau Pesero*, Balitbang Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2010.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- R. Soeroso, *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, 2012.
- Suhadibroto, *Profil JAM DATUN, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara*, Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Penerbit Erlangga, PT. Aksara Pratama, Jakarta, 2015.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

#### **B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, amandemen keempat.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*).
4. RV (*Reglement voor de Buitengewesten*)
5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
6. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
11. Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
13. Peraturan Jaksa Agung No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
14. Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/03/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**C. Internet**

1. Alipoetry, *Makhluk sosial zoon politico*, diakses dari <http://aliranim.blogspot.com/2010/12/makhluk-sosial-zoon-politicon.html>, pada tanggal 1 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.
2. Diakses dari <http://persatuan-jaksa-indonesia.org/view>, pada tanggal 14 Desember 2017, pukul 13.00 WIB.
3. Supatmo Eka Iskandar, Lock, diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2008/08/25/prinsip-pengembalian-asset-hasil-korupsi-bagian> pada 10 Januari 2018, pukul 10.00 WIB.
4. Diakses dari [skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrument-perdata-untuk-mengembalikan.html?m=1](http://skripsigratis83.blogspot.co.id/2011/07/instrument-perdata-untuk-mengembalikan.html?m=1), pada tanggal 20 Januari 2018, pukul 09.50 WIB.

5. Diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54f3260e923fb/arti-putusan-niet-ontvankelijke-verklaard-no>, pada tanggal 27 Maret 2018, pukul 22.50 WIB.

**D. Wawancara**

1. Heri Hermanus Horo, Koordinator Badan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, “wawancara”, tanggal 11 Januari 2018, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
2. Ardawati, Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, “wawancara”, tanggal 2 Januari 2018, Kejaksaan Negeri Padang.
3. Khustoid, Ajun Inspektur Tindak Pidana Umum Balreskim Polri Subdit Jantawil, “wawancara”, tanggal 14 Januari 2018, Komplek Perumahan Regency Bintara Bekasi.
4. Mukhlis Lubis, Ipda, “wawancara”, tanggal 28 Februari 2018, Polisi Daerah Propinsi Sumatera Barat.

